



# Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOSP

Rian Adi Setiawan<sup>1</sup>, Fangela Myas Sari<sup>2\*</sup>

Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama <sup>1,2</sup>,

E-mail: [rianadisetiawan@gmail.com](mailto:rianadisetiawan@gmail.com)

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the influence of human resource competencies, government internal control systems, and whistleblowing systems on fraud prevention. The sample used in this study consisted of 72 respondents who were educators and educational staff at public elementary schools in the South Pekalongan District. This study used a simple random sampling method. This research uses a quantitative approach with descriptive analysis, and the data collection technique is in the form of questionnaire questions. The data used in this research is primary data. Primary data is in the form of responses from respondents via questionnaires. The data analysis used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that human resource competencies, government internal control systems, and whistleblowing systems have a significant effect on fraud prevention and financial reporting. This study concludes that human resource competencies, government internal control systems, and whistleblowing systems have a significant effect on fraud prevention, which ultimately affects the quality of financial reports.*

## ARTICLE HISTORY

Received : 10 Mei 2025

Revised : 10 Juni 2025

Accepted : 11 Juni 2025

## KEYWORDS

Fraud\_Prevention;  
Human\_Resource\_Competence;  
Government\_Internal\_Control  
Systems; Whistleblowing Systems.

## CORRESPONDENCE

Nama: Rian Adi Setiawan

email: [rianadisetiawan@gmail.com](mailto:rianadisetiawan@gmail.com)



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## Pendahuluan

Sekolah merupakan tempat tiap orang belajar untuk memperoleh pengetahuan yang bermutu dalam menempuh pendidikan akademik. Tiap negara mengharapkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sehingga sanggup meningkatkan kemampuan diri untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, akhlak mulia, dan keahlian yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa serta negara. Tanpa adanya SDM yang

bermutu, dan hanya mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) maka SDA yang dimiliki hanya akan menjadi suatu bahan mentah yang tidak mempunyai nilai tambah sebab kurang pengetahuan serta keahlian yang dimiliki oleh masyarakat. Maka pemerintahan menghadirkan program yang membantu dalam peningkatakan SDM yaitu program dana BOSP (Bantuan Operasional Sekolah). Program dana BOSP berupaya untuk membantu sekolah dalam bentuk pembebasan biaya operasional sekolah, dengan tetap mempertahankan kualitas layanan pendidikan ([Kharismayani, 2020](#)).

Diharapkan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui program dana BOSP. Program dana BOSP merupakan metode pembiayaan pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung, khususnya bagi masyarakat tidak mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah salah satu cita-cita Bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Sebagai perwujudan pencapaian cita-cita bangsa maka dalam UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayainya dengan memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin terlaksana pendidikan secara merata, adanya peningkatan mutu, relevansi dan efisien untuk dapat melawan tantangan perubahan kehidupan yang berubah secara pesat, baik kehidupan lokal, nasional bahkan internasional sehingga pemerintah perlu melakukan perubahan dalam dunia pendidikan secara terencana, terarah dan dapat berkesinambungan. Mendukung sistem pendidikan nasional maka dibentuklah program dana bantuan satuan pendidikan sekolah (dana BOSP).

Peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan pemerataan memerlukan alokasi dan penyaluran dana penunjang kegiatan pendidikan. Program dana BOSP mulai dijalankan sejak bulan juli tahun 2005 dibawah naungan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS menyatakan bahwa dana BOS adalah dana yang digunakan oleh pihak sekolah dalam kegiatan operasional terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ([Kuntadi et al., 2023](#)).

Penelitian dilakukan pada seluruh SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Berdasarkan observasi pendahuluan di lapangan fenomena-fenomena dalam pengelolaan dana BOSP SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Selatan ada beberapa kasus seperti, (1) Dimana dalam proses pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dana BOSP

mengalami kesalahan input pada sistem RKAS dan mengungkapkan bahwa masih terjadi kesalahan dalam pembuatan LPJ. (2) Akuntabilitas yang dijalankan oleh pihak sekolah dimungkinkan belum terbuka atau belum memberikan akses terkait pengelolaan dana BOSP dengan tidak memasang laporan realisasi penggunaan dana selama satu tahun, laporan sisa dana, dan laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang atau jasa satuan pendidikan pada papan pengumuman sekolah. (3) Pembentukan tim BOSP tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2022 dimana kurang dilibatkan unsur wali murid dalam pengelolaan dana BOSP sehingga memungkinkan pelaksanaan dana BOSP tidak tepat pada sasaran. Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan dana BOSP SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Selatan dapat menimbulkan terjadinya keterlambatan realisasi dana BOSP dari dinas pendidikan kepada pihak sekolah karena pelaporan yang salah sehingga harus melakukan perbaikan dan tidak dapat selesai dengan tepat waktu. Maka pentingnya kompetensi SDM, sistem pengendalian internal pemerintah dan whistleblowing system dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOSP ([Priandini & Biduri, 2023](#)).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana BOSP untuk melakukan pencegahan adanya fraud adalah Kompetensi SDM. Menurut [Solihatunnisa dan Hastuti, \(2020\)](#) menyatakan bahwa SDM adalah sebuah unsur vital yang terdapat di dalam organisasi karena kinerja SDM menunjukkan terwujudnya visi dan misi dari sebuah organisasi. [Laksmi dan Sujana, \(2019\)](#) mengatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu yang memiliki jual dan itu teraplikasi dari hasil kreativitas dan inovasi yang dihasilkan. Selain Kompetensi SDM dalam pengelolaan dana BOSP juga diperlukan juga Sistem Internal Pemerintah (SPIP) agar pengelolaan dana BOSP dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya fraud di dalamnya. Menurut [Kusumaningrum dan Wulandari, \(2023\)](#) menyatakan bahwa pengendalian adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, pelaksanaan pengendalian membutuhkan dana dan bergantung pada orang yang melaksanakannya. [Nur'aini dan Arismutia, \(2024\)](#) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah sebuah pengawasan yang penting dilakukan dalam sebuah organisasi bukan hanya digunakan untuk mengelola catatan keuangan tetapi dapat digunakan dalam mengelola aktivitas organisasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan SPIP adalah sebuah sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja mereka. SPIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah dengan memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan SPIP, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi tantangan, memperbaiki proses, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat ([Rahmadani et al., 2023](#)). Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya fraud adalah whistleblowing system. Whistleblowing system adalah sistem yang memungkinkan individu untuk melaporkan kegiatan yang dianggap tidak etis, ilegal, atau tidak pantas yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Menurut para ahli, whistleblowing system merupakan mekanisme penting untuk memerangi korupsi,

penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran lainnya yang dapat merugikan organisasi atau masyarakat ([Aswandi et al., 2023](#)).

Sistem ini biasanya mencakup prosedur yang jelas untuk melaporkan pelanggaran, perlindungan bagi pelapor dari tindakan balasan atau pembalasan, serta mekanisme untuk menyelidiki dan menangani laporan whistleblowing dengan adil dan objektif. Whistleblowing system membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan adanya sistem ini, individu merasa lebih berani untuk mengungkapkan pelanggaran atau ketidakpatuhan, sehingga membantu mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi organisasi maupun masyarakat secara umum. Dalam petunjuk teknis tahun 2022 telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOSP pihak sekolah harus memiliki tim BOSP yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara dan anggota (satu orang guru, satu orang perwakilan komite dan satu orang dari unsur orang tua murid), dengan adanya komite dan wali murid dalam tim BOSP diharapkan mampu menciptakan pengendalian dan pengawasan sehingga dalam pelaksanaan dan penggunaan dana BOSP dapat berjalan sesuai dengan anggaran yang dibentuk serta tepat pada sasaran ([Prabawati & Rasmini, 2024](#)).

Variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sudah diteliti pada berbagai penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh [Solihatunnisa dan Hastuti, \(2020\)](#) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada SD Negeri Se-Kecamatan Pekalongan Selatan). Hasil penelitian ini adalah, sistem pengendalian internal pemerintah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel SPIP terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOSP. Semakin baik penerapan SPIP maka semakin baik juga pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOSP, whistleblowing system berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOSP. Dimana dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan whistleblowing system maka semakin baik juga pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOSP ([Artini et al., 2024](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh [Ayu et al., \(2021\)](#) yang berjudul pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik terhadap efisiensi penyaluran dana bantuan operasional sekolah pada sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Rimbo Ulu. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran dana BOS, transparansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran dana BOS, dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana BOS. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh [Rakhmawati, \(2018\)](#) dengan judul Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan partisipasi stakeholder sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, terdapat pengaruh negatif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS,

dan terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS .

Penelitian yang oleh [Putra, \(2014\)](#) yang berjudul Implikasi penerapan internal control terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana BOS. Hasil penelitian adalah internal Control berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana BOS. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat terlihat adanya perbedaan dan ketidakkonsistensi pada hasil penelitian. Perbedaan hasil tersebut mendukung peneliti menguji kembali variabel penelitian terdahulu dengan subjek yang berbeda yaitu SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Selatan. Berdasarkan paparan di atas dari teori, penelitian terdahulu, dan permasalahan-permasalahan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Whistleblowing system Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bosp Sd Negeri di Kecamatan Pekalongan Selatan”.

Untuk menjalankan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan efektif, penting bagi kita memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tata kelola keuangan yang tepat. Selain itu, sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah perlu didukung oleh whistleblowing system yang efektif. Dengan adanya mekanisme whistleblowing yang baik, pegawai memiliki kepercayaan untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proses kegiatan pengelolaan keuangan di satuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ([Widyawati et al., 2019](#)).

Fakta menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang sering muncul dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dalam sebuah wawancara dengan Ibu Tri Puji Lestari dan Ibu Sri Hayati (Operator BOSP di Sekolah Dasar Negeri Buaran), beberapa alasan bisa terjadinya permasalahan krusial yang teridentifikasi. Salah satunya adalah keterlambatan dalam proses penginputan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akibat masih adanya kesalahan dalam pelaksanaannya. Selain itu, terdapat kekurangan dalam penyajian, pengungkapan, dan akses terbuka kepada orang tua murid dan masyarakat secara umum terkait pengelolaan dana BOSP. Di samping itu, pembentukan tim BOSP juga belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang tepat guna mengatasi masalah-masalah tersebut agar pengelolaan dana BOSP dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## Metode

### Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang berarti mengacu pada jumlah data. Menurut KBBI, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data dalam jumlah

besar, bisa mencapai puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teori-teori yang tersedia. Dengan pendekatan ini, penelitian menjadi lebih objektif namun tidak terlalu mendalam. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah SD Negeri yang berada di Kecamatan Pekalongan Selatan. Lalu, waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juni 2024.

### Populasi, Sampel, Sampling

Populasi penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, operator BOSP, dan guru-guru yang bertugas di SD Negeri di wilayah Pekalongan Selatan. Mereka menjadi fokus studi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi dan efektivitas manajemen dana BOSP di lingkungan pendidikan tersebut. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan Non-probability Sampling dengan metode purposive sampling dimana teknik dalam pengambilan sampel ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan kepada responden. Kriteria Sampel dalam penelitian ini adalah 72 responden yang dengan kriteria: Merupakan kepala sekolah, operator BOSP, dan guru-guru dari berbagai SD Negeri yang ada di Kecamatan Pekalongan Selatan.

### Hipotesis Penelitian

#### 1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Alam terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Dalam konteks hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan pencegahan fraud, penelitian merujuk pada studi yang dilakukan oleh Ni Kadek Dwi Ariastini, Gede Adi Yuniarta, Putu Sukma Kurniawana (2018). Studi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis pertama: **H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.**

#### 2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Dalam konteks hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*, penelitian merujuk pada studi yang dilakukan oleh Gregorius Jeandry, Rena Mustari Mokoginta (2018). Studi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik sistem pengendalian internal, semakin tinggi juga tingkat pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis kedua: **H2: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.**

#### 3. Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Dalam kaitannya dengan hubungan antara *whistleblowing system* dan pencegahan *fraud*, penelitian merujuk pada kajian yang dilakukan [Aswandi, Andi Wawo, Raodahtul Jannah \(2023\)](#). Penelitian tersebut menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin efektif *whistleblowing system*, semakin tinggi juga tingkat pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis ketiga: **H3: *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.**

## Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak SPSS 22 for Windows. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data secara menyeluruh tanpa melakukan generalisasi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan data dari populasi atau sampel yang diperoleh melalui instrumen penelitian.

## Hasil

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata – rata (Mean), tertinggi (Max), terendah (Min), dan standar deviasi dari masing – masing variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2), Whistleblowing System (X3) dan Pencegahan Fraud terhadap Pengelolaan Dana BOSP (Y). Mengenai Hasil Uji Statistik Deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KOMPETENSI SDM	72	19,00	30,00	26,4028	2,85154
SPIP	72	17,00	30,00	24,6111	2,83119
WHISTLEBLOWING SYSTEM	72	19,00	30,00	26,7778	2,72300
PENCEGAHAN FRAUD	72	18,00	30,00	25,6111	2,67779
Valid N (listwise)	72				

Sumber : Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

Berdasarkan Hasil Uji Statistik Deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah :

1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Alam (X1), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 19, sedangkan nilai maksimum sebesar 30, rata – ratanya sebesar 26,4028 dan Standar deviasi data Kompetensi Sumber Daya Alam adalah 2,85154.

2. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 17, sedangkan nilai maksimum sebesar 30, rata – ratanya sebesar 24,6111 dan Standar deviasi data Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah 2,83119.
3. Variabel *Whistleblowing System* (X3), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 19, sedangkan nilai maksimum sebesar 30, rata – ratanya sebesar 26,7778, dan Standar deviasi data *Whistleblowing System* adalah 2,72300.
4. Variabel Pencegahan *Fraud* terhadap Pengelolaan Dana BOSP (Y), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 18, sedangkan nilai maksimum sebesar 30, rata – ratanya sebesar 25,6111 dan Standar deviasi data Pencegahan *Fraud* terhadap Pengelolaan Dana BOSP adalah 2,67779.

## Hasil Uji Kualitas Data

### 1. Validitas

Berikut ini hasil pengujian validitas dengan mengkorelasikan antara skor individu yang diperoleh masing-masing item atau butir dengan menggunakan skala likert. Dengan adanya uji validitas ini untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang disusun sudah baik dan dapat menghasilkan hasil yang valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	KOMPET ENSI SDM
X1.1	Pearson Correlation	1	,513**	,523**	,280*	,343**	,394**	,659**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,017	,003	,001	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.2	Pearson Correlation	,513**	1	,563**	,404*	,526**	,312**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,008	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.3	Pearson Correlation	,523**	,563**	1	,506**	,612**	,487**	,828**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.4	Pearson Correlation	,280*	,404*	,506**	1	,636**	,484**	,756**
	Sig. (2-tailed)	,017	,000	,000		,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.5	Pearson Correlation	,343**	,526**	,612**	,636**	1	,475**	,815**

	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000		,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X1.6	Pearson Correlation	,394**	,312**	,487**	,484**	,475**	1	,653**
	Sig. (2-tailed)	,001	,008	,000	,000	,000		,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
KOMPETENSI SDM	Pearson Correlation	,659**	,761**	,828**	,756**	,815**	,653**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

Sumber : Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	SPIP
X2.1	Pearson Correlation	1	,394**	,286*	,324**	,216	,290*	,624**
	Sig. (2-tailed)		,001	,015	,005	,069	,014	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X2.2	Pearson Correlation	,394**	1	,420**	,631**	,588**	,583**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,000	,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X2.3	Pearson Correlation	,286*	,420**	1	,505**	,489**	,429**	,674**
	Sig. (2-tailed)	,015	,000		,000	,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X2.4	Pearson Correlation	,324**	,631**	,505**	1	,610**	,727**	,816**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000		,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X2.5	Pearson Correlation	,216	,588**	,489**	,610**	1	,700**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,069	,000	,000	,000		,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X2.6	Pearson Correlation	,290*	,583**	,429**	,727**	,700**	1	,809**
	Sig. (2-tailed)	,014	,000	,000	,000	,000		,000

	N	72	72	72	72	72	72	72
SPI P	Pearson Correlation	,624**	,793**	,674**	,816**	,781**	,809**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

Sumber: Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

Tabel 4. Hasil Uji Validitas *Whistleblowing System*

Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	WHISTLEBLOWING SYSTEM
X3.1	Pearson Correlation	1	,414*	,431**	,192	,312**	,378**	,578**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,106	,008	,001	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X3.2	Pearson Correlation	,414*	1	,503*	,341**	,530*	,305*	,724**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,000	,009	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X3.3	Pearson Correlation	,431**	,503*	1	,488*	,633*	,514**	,816**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X3.4	Pearson Correlation	,192	,341**	,488*	1	,610**	,543*	,748**
	Sig. (2-tailed)	,106	,003	,000		,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X3.5	Pearson Correlation	,312**	,530*	,633*	,610**	1	,439*	,828**
	Sig. (2-tailed)	,008	,000	,000	,000		,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
X3.6	Pearson Correlation	,378**	,305*	,514**	,543*	,439*	1	,679**
	Sig. (2-tailed)	,001	,009	,000	,000	,000		,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
WHISTLEBLOWING SYSTEM	Pearson Correlation	,578*	,724*	,816**	,748*	,828*	,679*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	

	N	72	72	72	72	72	72	72
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

Sumber : Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pencegahan fraud

		Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	PENCEGAHAN FRAUD
Y1	Pearson Correlation	1	,318**	,068	,348*	,485**	,399**	,597**
	Sig. (2-tailed)		,006	,569	,003	,000	,001	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
Y2	Pearson Correlation	,318**	1	,367**	,278*	,383**	,431**	,692**
	Sig. (2-tailed)	,006		,002	,018	,001	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
Y3	Pearson Correlation	,068	,367**	1	,320*	,282*	,233*	,623**
	Sig. (2-tailed)	,569	,002		,006	,016	,049	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
Y4	Pearson Correlation	,348*	,278*	,320*	1	,419**	,451**	,680**
	Sig. (2-tailed)	,003	,018	,006		,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
Y5	Pearson Correlation	,485*	,383**	,282*	,419**	1	,636**	,756**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,016	,000		,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
Y6	Pearson Correlation	,399*	,431**	,233*	,451**	,636**	1	,737**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,049	,000	,000		,000
	N	72	72	72	72	72	72	72
PENCEGAHAN FRAUD	Pearson Correlation	,597**	,692*	,623*	,680*	,756**	,737**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

## 2. Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	72	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	72	100,0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,837	6

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

Untuk mengetahui reliabilitas di atas, dapat dilihat dibagian Cronbach's Alpha. Apabila alpha lebih besar dari 0,60 ( $>0,60$ ) maka data dikatakan reliabel. Tabel di atas terlihat dibagian Cronbach's Alpha untuk variabel 1 atau kompetensi sumber daya manusia menunjukkan 0,837 sehingga memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel mencukupi. Hal ini berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini reliabel digunakan sebagai pengumpul data.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	72	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	72	100,0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,823	6

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, untuk variabel 2 atau sistem pengendalian internal pemerintah menunjukkan Cronbach's Alpha 0,823 yang berarti lebih besar dari 0,60. Maka indikator dari variabel ini dapat dikatakan reliabel mencukupi. Hal ini berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini reliabel digunakan sebagai pengumpul data.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas *Whistleblowing System*

Case Processing Summary				Reliability Statistics	
		N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Cases	Valid	72	100,0	,820	6
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0		
	Total	72	100,0		

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, untuk variabel 3 atau *whistleblowing system* menunjukkan Cronbach's Alpha 0,820 yang berarti lebih besar dari 0,60. Maka indikator variabel ini dapat dikatakan reliabel mencukupi. Hal ini berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini reliabel digunakan sebagai pengumpul data.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Pencegahan *fraud*

Case Processing Summary				Reliability Statistics	
		N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Cases	Valid	72	100,0	,754	6
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0		
	Total	72	100,0		

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Output SPSS Statistic 27, Data primer telah diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, untuk variabel 4 atau pencegahan *fraud* menunjukkan Cronbach's Alpha 0,754 yang berarti lebih besar dari 0,60. Maka indikator variabel ini dapat dikatakan reliabel mencukupi. Hal ini berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini reliabel digunakan sebagai pengumpul data.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOSP di SD Negeri Kecamatan Pekalongan Selatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa SDM yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih memahami prosedur keuangan, memiliki integritas yang baik, dan mampu melaksanakan tugas dengan akuntabilitas

yang tinggi. Kompetensi tersebut mencakup pengetahuan teknis, keterampilan administratif, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam konteks pengelolaan dana BOSP, kepala sekolah, operator, dan guru memegang peran penting dalam setiap tahap siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Ketika mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai, kesalahan administratif seperti input data yang keliru dalam sistem RKAS dan LPJ dapat diminimalisasi. Selain itu, SDM yang kompeten akan lebih patuh terhadap aturan serta mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SPIP yang efektif mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan terkendali. SPIP berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memperkuat akuntabilitas institusi pendidikan dalam mengelola anggaran ([Anisatuz Za'imah et al., 2019](#)).

Penerapan SPIP yang baik mencakup penyusunan kebijakan pengendalian internal, monitoring berkala, evaluasi risiko, dan pembentukan struktur pengawasan yang jelas. Dalam konteks sekolah, pengendalian internal dapat berbentuk pembagian tugas yang tegas antar anggota tim BOSP, audit internal oleh pengawas sekolah, serta pelaporan keuangan yang terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Ketika kontrol ini berjalan secara konsisten, peluang terjadinya *fraud* dapat ditekan secara signifikan. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan pada variabel *whistleblowing system*, yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman para pegawai tentang sistem pelaporan pelanggaran, kurangnya akses terhadap kanal pelaporan, serta ketakutan akan retaliasi atau pembalasan setelah melaporkan dugaan penyimpangan.

Dalam banyak kasus, budaya organisasi yang belum mendukung praktik pelaporan juga turut menjadi hambatan. *Whistleblowing system* yang tidak efektif dapat menyebabkan potensi *fraud* tidak terdeteksi secara dini. Padahal, sistem ini seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial internal untuk mendeteksi dan melaporkan penyimpangan secara rahasia dan aman. Ketika pelapor merasa tidak terlindungi atau merasa bahwa laporan mereka tidak ditindaklanjuti dengan serius, maka sistem ini kehilangan kredibilitasnya. Akibatnya, kecurangan dalam pengelolaan dana bisa tetap terjadi tanpa adanya deteksi dini.

Temuan ini memberikan sinyal perlunya evaluasi dan peningkatan efektivitas implementasi *whistleblowing system* di lingkungan sekolah. Pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah, perlu menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, menjamin anonimitas, dan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan berkala mengenai etika pelaporan juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian pegawai dalam menyuarkan penyimpangan. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori *fraud triangle* yang menyebutkan bahwa *fraud* dapat dicegah apabila terdapat

kompetensi, pengendalian internal, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Kompetensi SDM bertindak sebagai benteng pertama dalam pencegahan *fraud*, SPIP sebagai sistem yang menjaga proses tetap berada dalam koridor hukum, sementara *whistleblowing* adalah alat deteksi dini terhadap kecurangan yang belum terjangkau sistem formal.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu menekankan penguatan kapasitas SDM dan sistem pengawasan internal. Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi kepala sekolah, guru, serta operator BOSP harus menjadi agenda prioritas. Begitu pula pembentukan tim BOSP harus melibatkan unsur komite sekolah dan wali murid agar tercipta transparansi dan partisipasi dalam pengawasan anggaran. Secara keseluruhan, pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOSP tidak bisa hanya bergantung pada satu faktor. Perlu sinergi antara peningkatan kompetensi individu, penguatan sistem, dan terciptanya budaya organisasi yang mendukung kejujuran serta akuntabilitas. Meskipun *whistleblowing system* belum menunjukkan pengaruh signifikan, bukan berarti sistem ini harus diabaikan. Justru perlu perbaikan agar dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari sistem integritas sekolah

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Semakin kompetensi sumber daya manusia berjalan maka akan semakin banyak pengalaman dalam pencegahan fraud/kecurangan terutama di SD Negeri Kecamatan Pekalongan Selatan. Selain itu, dengan memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, organisasi akan diakui dan akan mempermudah proses operasional serta pelaporan kinerja menjadi lebih efektif.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Karena pengendalian internal pemerintah juga bagian dari pendukung dalam pencegahan fraud, Dengan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, pemerintah dapat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan adanya pegawai yang paham dengan pengendalian internal pemerintah, proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan akurat, serta memastikan peraturan di suatu instansi terkontrol dengan baik.
3. Whistleblowing system tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Karena whistleblowing system ini tidak dapat membantu secara langsung dalam proses pencegahan fraud, seperti laporan yang diterima kadang tidak sesuai dengan kenyataan, dan jumlah laporan yang masuk juga tidak menentu. Selain itu, laporan whistleblowing sering kali memerlukan waktu yang lama untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti, sehingga tindakan pencegahan tidak dapat dilakukan dengan segera. Kurangnya kepercayaan karyawan terhadap perlindungan yang diberikan oleh sistem juga

mengurangi jumlah pelaporan, sehingga sistem ini tidak efektif dalam mendeteksi dan mencegah fraud secara proaktif..

## Daftar Pustaka

- Anisatuz Za'imah, Sobarudin, M., Intan Permatasari, N., & Nur Nabilah, Z. (2019). *Program Studi SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang*. 16004.
- Artini, N. K. Y., Diatmika, I. P. G., & Purnamawati, I. G. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*), 15(03). <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>
- Aswandi, Andi Wawo, & Raodahtul Jannah. (2023). Pengaruh Proactive Fraud Audit, Whistleblowing System Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(2), 118–133. <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i2.2023d4>
- Ayu, H. C., Ferdian, T., & Nelvia, R. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 132–145.
- Kharismayani, K. M. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas ....* 2(2), 758–769. <https://repo.undiksha.ac.id/4618/>
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651–662. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1458>
- Kusumaningrum, R., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 156–161. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Nur'aini, L., & Arismutia, S. A. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung). *ECo-Buss*, 6(3), 1458–1470. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1200>

- Prabawati, N. W. S., & Rasmini, N. K. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, Whistleblowing Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(5), 921. <https://doi.org/10.24843/eeb.2024.v13.i05.p06>
- Priandini, E. A. M., & Biduri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.6>
- Putra, R. (2014). *Implikasi Penerapan Internal Control Terhadap Pencegahan Fraud Atas Pengelolaan Dana Bos*.
- Rahmadani, A. P., Nugroho, G. W., & Martaseli, E. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Akuntoteknologi*, 15(2), 34–47. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2244>
- Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>
- Solihatunnisa, S., & Hastuti, H. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana: Studi Pada Smkn 6 Kota Malang. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 9(1), 70–85. <https://doi.org/10.30591/monex.v9i1.1699>
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.

